BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Perdagangan dalam negeri berperanan penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena dapat mendorong pertumbuhan produksi dengan menjamin pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi, disamping juga dapat melindungi konsumen dengan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik dan harga yang stabil. Dengan demikian dapat pula menjamin kemantapan pengadaan dan kelancaran arus barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting atau strategis yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan yang merata sampai ke daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, berkembangnya kegiatan perdagangan dalam negeri pada tingkat harga yang sepadan dengan pertumbuhan produksi dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat.

Salah satu sasaran dari program kerja pemerintah adalah memperkuat perdagangan dalam negeri. Pilihan ini sangat tepat dan sudah menjadi pilihan banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Jumlah penduduk Amerika Serikat tidak berbeda jauh dari Indonesia. Yang berbeda mencolok, antara lain adalah pendapatan per kapita dan bentuk geografis serta tingkat perkembangan SDM dan teknologinya.

Industri kendaraan bermotor dan sektor perumahan serta pengolahan pascapanen produk pertanian dan peternakan menjadi bagian andalan Amerika untuk memperkuat ekonominya melalui perdagangan dalam negeri. Sektor keuangan dan kelancaran angkutan menjadi penunjang untuk memperlancar dan menggairahkan arus distribusi barangnya. Tantangan bentuk geografis Indonesia yang duapertiga luasnya adalah lautan, justru menjadi peluang yang sangat dinantikan, jika dikelola dengan baik. Sektor perhubungan, terutama laut dan udara menjadi peluang bisnis yang sangat menantang. Angkutan darat di beberapa pulau yang besar pun belum optimal dan masih sarat dengan unsur KKN serta jauh dari tertib/disiplin berlalu lintas. Rendahnya citra pelayanan para birokrat dan ruwet serta tumpang-tindihnya aturan menghambat berkembangnya sektor angkutan ini. Angkutan yang dikelola dengan baik dan efisien merupakan salah satu faktor pendukung dari kelancaran distribusi barang dan manusia, termasuk wisnus.

Potensi yang melimpah dan tersedianya SDA serta suburnya lahan merupakan sumber objek yang diperdagangkan. Demikian pula dengan jumlah penduduk di atas 220 juta, bukan hanya merupakan potensi pasar yang besar, juga sumber dari tersedianya banyak pelaku yang andal dan tekun serta cekatan. Namun untuk memperkuat kegiatan perdagangan dalam negeri, masih ada hal yang masih terlupakan selama ini dan perlu segera dibenahi dan dilengkapi.

Berpedoman kepada negara yang telah kuat dan tertibnya pelaksanaan perdagangan dalam negerinya, tidak terlepas juga harus

tersedia berbagai aturan yang mengikat dan diterima masyarakat dunia usaha. Hal ini diperlukan bukan hanya untuk kelancaran kegiatan perdagangan, tetapi juga menciptakan adanya kepastian yang terkait dengan faktor-faktor perdagangan itu sendiri. Keteraturan dan tertib kegiatan perdagangan dalam negeri, akan mengimbas kepada perdagangan luar negeri suatu negara.

Citra suatu negara juga akan terangkat, jika terdapat ketertiban dalam aspek perdagangannya. Salah satu yang akan mengangkat citra perdagangan suatu negara adalah telah tersedianya panduan dan syarat perniagaan dari objek dagangan di negara tersebut. Wujud nyata dari adanya pengaturan ini, tersedianya bermacam standar kontrak dengan format yang baku untuk setiap objek dagangan yang ada. Untuk kepastian dan efisiensi, maka masing-masing format kontrak dari setiap sektor dilengkapi dengan sarana dan peraturan arbitrasi. Hal ini penting, karena kegiatan bisnis sarat dengan faktor yang dapat menimbulkan perselisihan dagang dan hal ini harus diselesaikan dengan cepat dan efektif serta efisien.

Era desentralisasi dan otonomi daerah pembangunan ekonomi merupakan salah satu program penting dan strategis dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi daerah selain ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah itu sendiri juga mewujudkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Ketahanan ekonomi daerah sangat tergantung kepada potensi ekonomi yang ada didaerah untuk dikelola dengan benar dan effisien. Sejak penerapan

kebijakan desentralisasi, proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan ekonomi telah dilimpahkan ke daerah, termasuk dalam hal perizinan, sebagian besar merupakan kewenangan daerah kecuali yang bersifat strategis dan berskala nasional. Daerah berwenang mengambil langkah-langkah cepat yang dianggap perlu, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mencari cara yang terbaik untuk menarik investasi. Lahirnya Permendagri No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi sehingga lebih meningkatkan dan menggairahkan ekonomi kerakyatan serta perekonomian daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Perindag No. 591/ MPP/ Kep/10 /99/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Ijin Usaha Perdagangan Pemerintah daerah mulai memahami pentingnya peningkatan layanan perijinan usaha bagi perusahaan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang jumlahnya sangat banyak di daerah. Para pemilik perusahaan memerlukan ijin usaha apabila.

Krisis perekonomian global berdampak signifikan terhadap sektor perdagangan Indonesia. Untuk mempertahankan sektor perdagangan, secara kontekstual titik berat program kedepan adalah menciptakan lapangan kerja serta peningkatan daya tahan dan daya bangkit usaha yang mampu menciptakan dampak positif bagi perekonomian. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat pardagangan dalam negeri,

memacu ekspor dengan mulai mengalihkan tujuan pasar ke Negara-negara di luar pasar tradisional serta memperketat impor produk-produk tertentu yang rawan penyelundupan.

Kebijakan memperkuat perdagangan dalam negeri, menjadi landasan dan upaya bagi pencapaian program prioritas nasional dalam penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat perdagangan dalam negeri, departemen perdagangan saat ini terus berupaya dengan program-programnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan perluasan kesempatan kerja serta menjaga iklim perdagangan dalam negeri yang kondusif.

Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), efisiensi sistem pemasaran dan infrastruktur pasar, kualitas sistem logistik dan distribusi baik di tingkat kabupaten/kota, antar provinsi dan antar wilayah serta secara konstruktif dan berkesinambungan melakukan pengamanan pasar dalam negeri, mempromosikan penggunaan produksi dalam negeri dengan berbagai kegiatan sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI) dan mengikutsertakan UMKM dalam pameran yang bertajuk ekonomi kreatif di daerah, skala nasional maupun internasional.

Melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, pemberdayaan UMKM semakin menjadi prioritas pemerintah. Dalam undang-undang tersebut, pemberdayaan UMKM dilakukan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang

seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan berbagai pedoman yang dapat menjadi acuan para pelaku UMKM yang berbagai program dan langkah operasional yang meliputi aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Kepemilikan izin usaha akan membantu menciptakan identitas perusahaan, dan dengan demikian memudahkan akses bagi pemilik perusahaan itu untuk memperluas pasar ataupun berurusan dengan lembaga keuangan. Akan tetapi, jumlah perusahaan yang terdaftar secara resmi hingga kini masih sedikit akibat tingginya biaya perijinan usaha serta adanya syarat-syarat birokratis yang memberatkan. Pemerintah daerah menyadari manfaat dari perijinan usaha. Dari sudut pandang mereka, data tentang jumlah perusahaan setempat akan melindungi perusahaan tersebut dan sekaligus juga memungkinkan pemerintah untuk menyusun Perda, kebijakan, dan program baru yang terkait dengan dunia usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah proses pembahasan penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program kebijakan perdagangan dalam negeri yang dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
2. Bagaimana target dan sasaran kebijakan perdagangan dalam negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
3. Siapa saja unsur pelaksana dalam kebijakan perdagangan dalam negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
4. Bagaimana faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari laporan KKL ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Cirebon.

Adapun tujuan laporan KKL ini adalah :

1. Untuk mengetahui program yang dilaksanakan yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dalam perdagangan dalam negeri di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui target dan sasaran kebijakan perdagangan dalam negeri di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui unsur pelaksana dalam kebijakan perdagangan dalam negeri di Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri di Kabupaten Cirebon.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari laporan KKL ini adalah :

1. Bagi kepentingan penulis, dengan adanya laporan KKL ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan proses laporan KKL mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai ajang implementasi ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan.
2. Bagi kegunaan teoritis, dalam rangka mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori melalui penelitian ke lapangan. Dimana dalam laporan KKL ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan laporan KKL serupa dimasa yang akan datang.

3. Bagi kegunaan praktis, untuk memberikan masukan dan kritikan yang membangun bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan proses pelaksanaan pelayanan publik.

1.5 Kerangka Pemikiran

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Van meter dan van horn mengemukakan bahwa : “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65)

Jadi Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang didalamnya adanya keterkaitan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan tanah air atau tempat

dimana yang bersangkutan berada. Dan hal ini seyogyanya direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara, dan adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat. (Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, 2007:102) membatasi imnplementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Edwards dan Sharkansky dalam Islamy bahwa kebijakan publik :

> “Dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah”.(Edwards dan Sharkansky dalam Islamy, 2004:18-19).

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efesiensi dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.

Berdasarkan pengertian implementasi diatas, Smith mengemukakan beberapa hal komponen-komponen model sistem implementasi yang dikutip Tachjan yaitu :

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan.
2. Target group dan sasaran.
3. Unsur pelaksana (*implementor*).
4. Faktor lingkungan.
   (Smith dalam Tachjan, 2006:37).

Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensoins*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam laporan KKL ini adalah :

1. Implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.
2. Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan

langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

1) Program kegiatan terkait dengan penyusunan kebijakan perdagangan dalam negeri meliputi:

a. Kebijakan, Kebijakan ini di buat oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berupa aturan-aturan dalam bekerja, demi keberhasilan Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

b. Prosedur, di dalam perumusan Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri perlu dirumuskan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis atau tesusun supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

c. Anggaran biaya (*budget*), diperlukan untuk membuat kebijakan pelayanan publik dalam perdagangan dalam negeri di Kabupaten Cirebon.

2) Target group/sasaran mengenai implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri meliputi:

a. Tingkat pendidikan, dalam mencapai suatu kinerja yang maksimal diperlukan kesanggupan atau kecakapan yang terampil dan terlatih dari para pegawainya untuk menjalankan Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

b. Pengalaman, konsentrasi yang baik dari individu dalam bekerja diharapkan mereka dapat bekerja produktif untuk menjalankan Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

c. Sosial ekonomi, sehubungan dengan di lakukannya Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi Kabupaten Cirebon itu sendiri.

3) Unsur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan perdagangan dalam negeri meliputi:

a. Aparatur, bagaimana kinerja aparatur untuk mendayagunakan potensinya secara optimal sehubungan dengan dilakukannya Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

b. Strutur birokrasi, birokrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

c. Relasi, hubungan yang terjadi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat mempengaruhi terhadap pengumpulan data, terutama dalam hal ini data mengenai Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

4) Faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri meliputi:

a. Sumber Daya Manusia, penempatan aparatur yang sesuai dengan kemampuan bekerjanya untuk menjalankan Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

b. Organisasi, menggambarkan lingkungan kerja mereka dan mengetahui hubungan yang hirarkhi antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon untuk menjalankan Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

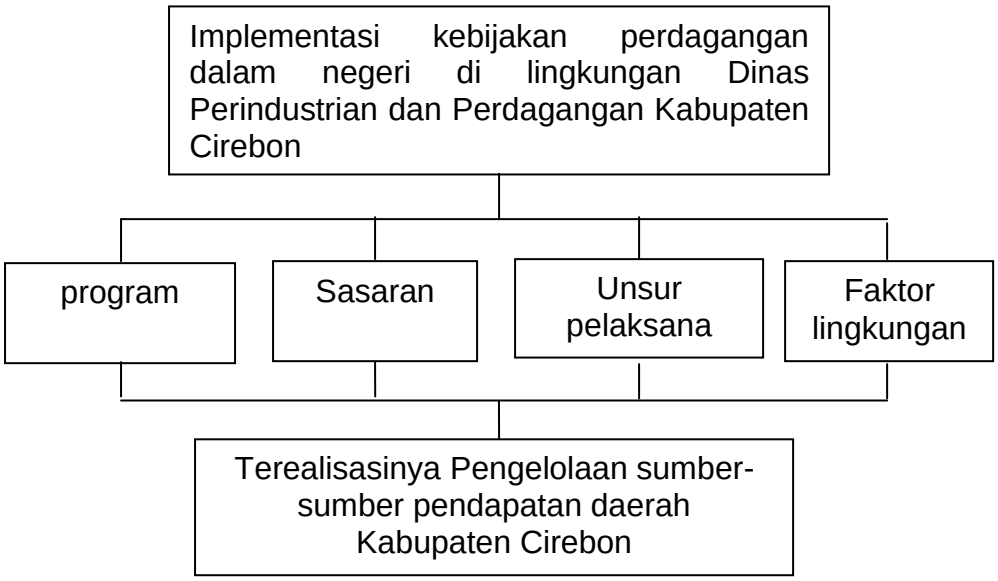
c. Penghargaan, adanya kriteria-kriteria bagi para aparatur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti daftar kehadiran, kemampuan menyelesaikan tugas dan yang lainya, untuk mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menjalankan Implementasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

3. Kebijakan perdagangan dalam negeri adalah pembangunan ekonomi nasional yang dapat mendorong pertumbuhan produksi dengan menjamin pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi, disamping juga dapat melindungi konsumen dengan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik dan harga yang stabil.

Berdasarkan definisi operasional diatas maka model kerangka pemikiran laporan KKL sebagai berikut:

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Laporan KKL

Dalam penulisan laporan KKL ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklarifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam laporan KKL ini penulis menggunakan metode deskriptif.

> Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan objek atau subjek penelitian (seorang, lembaga, atau kelompok) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau bagaimana adanya. (Nawawi, 1990:63).

Dengan demikian metode deskiptif, mendata atau mengelompokkan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada. Informasi deskriptif dalam kegiatan ilmiah

akan memperlihatkan bahwa jalan dari suatu fakta menuju suatu fakta ilmiah adalah sebuah jalan yang sadar.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan KKL ini adalah :

1. Observasi, melakukan pengamatan atas perilaku seseorang dengan mendengarkan berbagai ucapan mengenai berbagai ragam soal pada aparatur pemerintahan. Pengamatan dilakukan terhadap aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, mengenai bagaimana kewenangan-kewenangan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi mengenai perdagangan dalam negeri.
2. Studi Pustaka, mencari, memilah dan membaca buku-buku, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan dalam negeri.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriftif kualitatif dapat diartikan sebagai strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (*Setting*) tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (*grounded*) dalam data (Suyanto, 2005:183).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Secara operasional teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model analisis data

Pertama, reduksi data didapat di lapangan langsung di ketik atau ditulis langsung dengan rapi, terperinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian, laporan perlu di reduksi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan.

Kedua, *display* data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan *display* data. *Display* data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

Ketiga, pengambilan keputusan dan verifikasi berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan hipotesis. Jadi dari data yang didapat mencoba untuk mengambil kesimpulan.

Laporan penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

1.7 Lokasi dan Jadwal KKL

Lokasi KKL ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Sunan Kalijaga No. 10 Sumber Kabupaten Cirebon.

Adapun rincian kegiatan KKL di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Jadwal Laporan KKL

Waktu / Kegiatan	2010				
	Juni	**Juli**	**Agustus**	**September**	**November**
Pemilihan Lokasi					
Bimbingan Usulan Laporan KKL					
Usulan Laporan KKL disetujui					
Pelaksanaan KKL					
Penyusunan Laporan KKL					
Pengumpulan Laporan KKL					